

Seminar Hasil Penelitian
ANALISIS KEBIJAKAN PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN

Sahat Pasaribu
Bambang Sayaka
Wahyuning K. Sejati
Adi Setiyanto
Juni Hestina
Jefferson Situmorang

PUSAT ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN
Desember 2007

PENDAHULUAN

ABSTRAK

Pembiayaan pertanian merupakan faktor penting dalam pembanguana pertanian. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program pembiayaan untuk membantu eptani dalam mengatasi kesulitan modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor pertanian oleh berbagai lembaga/instansi serta mengetahui perkembangan program pembiayaan di sektor pertanian pada 3 (tiga) skim pembiayaan yang dikelola Departemen Pertanian, yaitu KKP, SP3 dan LM3. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Anggaran pertanian nasional hanya sedikit yang dikelola oleh Departemen Pertanian. Pembiayaan pertanian juga hanya memperoleh porsi yang relatif kecil dan tersebar di berbagai instansi pememrintah. Beberapa kendala persyaratan seperti agunan membuat sangat sedikit petani skala kecil yang menerima KKP. Sedangkan SP3 lebih banyak diserap pedagang maupun industri pengolahan (sektor hilir) dibanding petani/peternak (sektor hulu). Pelaksanaan LM3 perlu perencanaan yang lebih cermat serta monitoring yang lebih baik agar usaha yang dikelola oleh lembaga penerima bisa lebih menguntungkan dan berkelanjutan.

Kata kunci: KKP, SP3, LM3, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, pembiayaan

Latar Belakang

Ketersediaan input pertanian dan bahan baku dalam proses produksi juga merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya dengan keperluan menghasilkan output pertanian. Rendahnya aksesibilitas terhadap bibit dan pupuk akhir-akhir ini telah mempengaruhi proses produksi diluar faktor eksternalitas seperti perubahan iklim dan jumlah curah hujan yang diinginkan. Penyediaan faktor produksi bibit dan pupuk juga membutuhkan biaya karena kelangkaan penawaran dan harganya yang melonjak dan hampir tidak dapat dikendalikan. Kebijakan pemerintah yang menyediakan bibit dan pupuk bersubsidi menurut mekanisme penyaluran tertentu diduga belum mengenai sasaran karena berbagai alasan, diantaranya rawan penyelewengan dan manipulasi.

Kelembagaan keuangan yang ada di daerah, seperti bank pembangunan daerah dan cabang-cabang bank pemerintah di daerah serta lembaga perkreditan (BPR dan sejenisnya), dinilai masih belum memberikan fasilitas pelayanan yang memadai bagi pembangunan pertanian. Kredit diberikan kepada nasabah secara selektif, karena lembaga keuangan ini juga tidak ingin mengalami kerugian jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan. Dalam kaitan ini, sejumlah program pemerintah terkait dengan usaha memberdayakan ekonomi rakyat dan sektor pertanian telah dilaksanakan. Program

yang lama dan yang baru bahkan sama-sama dijalankan di berbagai daerah dengan tujuan yang sama, namun dengan sasaran yang berbeda. Keseluruhan kebijakan skim pembiayaan ini dimaksudkan untuk mempercepat gerakan ekonomi rakyat dan mendorong proses produksi pertanian (Syukur *et al.*, 2003).

Dalam konteks pembangunan pertanian secara nasional, sebenarnya Departemen Pertanian tidak sendirian. Berbagai lembaga/instansi pemerintah dan swasta melakukan usaha-usaha membantu program pembangunan pertanian. Departemen Pekerjaan Umum memiliki mandat untuk membangun dan merehabilitasi jaringan irigasi, termasuk membangun jalan di sepanjang saluran air jaringan yang bersangkutan. Departemen Koperasi dan UKM juga melakukan berbagai program yang mendukung kegiatan pertanian, seperti pengadaan input dan pengolahan hasil pertanian. Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat juga melakukan sejumlah kegiatan mendukung usaha pertanian yang dibungkus dengan program-program penanggulangan kemiskinan. Dalam kaitan dengan pembiayaan pertanian, sangat baik untuk diketahui berapa banyak program dan berapa banyak dana yang disediakan pemerintah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pertanian secara nasional. Skim-skim permodalan yang masih berjalan yang dikelola lembaga/instansi pemerintah perlu diketahui untuk mengetahui posisi masing-masing lembaga/instansi tersebut dalam pembangunan pertanian nasional. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang perbaikan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pertanian di Indonesia .

Perumusan Masalah

- 1) Dukungan pembiayaan antar sektor. Pembiayaan pembangunan pertanian yang dilaksanakan lembaga/instansi pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung, hingga kini terus berlangsung tanpa diketahui seberapa besar sumbangan masing-masing lembaga/instansi tersebut dalam pembangunan pertanian nasional.
- 2) Keuntungan komparatif dan variasi skim pembiayaan. Jika dikembalikan kepada pilihan komoditas, keuntungan komparatif dan prospektif dibutuhkan untuk memperkirakan seberapa besar investasi yang ditanam tersebut mampu memberikan nilai ekonomi dan sosial.

- 3) Berbagai kendala ditemui dalam pembiayaan pertanian, khususnya petani skala kecil. Tingkat pengembalian kredit umumnya rendah atau menimbulkan kredit bermasalah. Penghasilan dari usahatani jauh lebih kecil dibanding kebutuhan rumah tangga sehingga hanya sebagian kecil hasil panen yang dialokasikan untuk membayar kredit.

Tujuan

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai pembangunan sektor pertanian oleh berbagai lembaga/instansi pemerintah serta mengetahui perkembangan program pembiayaan di sektor pertanian pada 3 (tiga) skim pembiayaan yang dikelola Departemen Pertanian. Tersedianya data, informasi dan pengetahuan tentang hal tersebut diatas dinilai sangat penting untuk merumuskan kebijakan dalam rangka memperbaiki alokasi anggaran pembangunan pertanian dan meningkatkan kinerja skim pembiayaan di sektor pertanian. Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengumpulkan data, informasi dan pengetahuan tentang pengeluaran pemerintah untuk mendukung program pembangunan pertanian oleh berbagai lembaga/instansi pemerintahan di pusat maupun di daerah.
2. Mempelajari skim pembiayaan SP3, LM3 dan KKP secara komprehensif dan menganalisis keuntungan komparatif pembiayaan sektor pertanian menurut pencapaiannya.
3. Merumuskan saran kebijakan untuk meningkatkan koordinasi pengalokasian anggaran pembangunan pertanian dan meningkatkan kinerja skim pembiayaan sektor pertanian.

METODOLOGI

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk menganalisis skim pembiayaan program KKP, SP3, dan LM3 dilakukan di dua provinsi, yakni Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung) dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah). Di tingkat regional data sekunder KKP diambil dari Kabupaten Tulungagung, data sekunder SP3 dari Provinsi Nusa Tenggara, dan data sekunder LM3 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jenis Data dan Metode Analisis

Data primer diperoleh dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui wawancara dengan responden penerima KKP baik perorangan maupun kelompok, penerima SP3 dan pondok pesantren penerima LM3. Data sekunder yang bersifat nasional diperoleh di Jakarta terutama dari Departemen Pertanian dan Departemen Keuangan. Data sekunder juga diperoleh dari BRI (Bank Rakyat Indonesia), dan BPD (Bank Pembangunan Daerah) Jawa Timur dan BPD Nusa Tenggara Barat. Jumlah responden KKP 6 kelompok di Jatim, dan 10 orang/kelompok di NTB. Jumlah responden SP3 Jatim 5 orang pengusaha dan 19 orang di NTB. Jumlah responden LM3 di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi NTB masing-masing sebanyak lima pondok pesantren. Selain itu data primer yang bersifat kualitatif juga diperoleh dari tokoh masyarakat, pengurus koperasi, pegawai bank penyalur kredit, dan dinas pertanian/peternakan di provinsi dan kabupaten tempat penelitian dilakukan. Data primer maupun sekunder dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran dan Jenis-Jenis Anggaran Pembangunan Pertanian

Anggaran pembangunan pertanian tidak hanya dialokasikan di Departemen Pertanian, tetapi juga terdapat di berbagai departemen dan instansi pemerintah lainnya. Pada tahun 2007, misalnya, total anggaran pembangunan pertanian adalah sebesar Rp 23,2 triliun (Tabel 1). Anggaran paling besar (Rp 8,8 triliun) dikelola oleh Departemen Pertanian. Sedangkan anggaran kedua terbesar (Rp 7,6 triliun) dialokasikan untuk Departemen Perhubungan, PU, Kimpraswil, dan ESDM. Selanjutnya pengelola anggaran

pembangunan pertanian adalah Departemen Dalam Negeri (Rp 1,2 trilyun), Departemen Kesehatan (Rp 0,99 trilyun), Depnakertrans (Rp 0,93 trilyun). Selebihnya anggaran dikelola oleh Departemen maupu isntansi lainnya yang jika dijumlah maka nilainya relatif signifikan.

Tabel 1. Sebaran Nilai Anggaran Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berdasarkan Instansi, 2002 – 2007 (Rp Milyar)

No	Instansi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata	R (%/Thn)
1	Departemen Dalam Negeri	1,203.39	1,216.60	1,224.83	1,238.05	1,216.60	1,203.62	1,217.18	0.01
2	Departemen Pertanian	2,617.70	3,300.10	3,711.70	5,022.78	6,289.58	8,789.62	4,955.25	27.77
3	BPPT, LIPI, Bakosurtanal, BATAN, Depdikbud, Depag	506.89	492.33	478.19	550.15	566.42	640.50	539.08	5.07
4	Departemen Perindustrian dan Perdagangan	301.49	342.00	312.78	241.40	361.33	409.88	328.15	9.04
5	Kementrian Koperasi dan UKM	219.21	224.52	246.10	234.63	283.33	246.10	242.31	3.00
6	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	598.25	546.53	766.14	1,000.87	725.77	923.65	760.20	12.39
7	KLH, Dephut dan DKP	261.81	284.44	303.30	286.58	311.36	361.45	301.49	6.90
8	Departemen Perhubungan, PU, Kimpraswil dan ESDL	4,533.68	5,618.46	7,376.17	7,776.86	7,750.47	7,564.52	6,770.03	11.58
9	BKPM, BSN, BPN	143.15	153.50	123.62	104.66	111.79	128.88	127.60	-1.09
10	Kementrian Daerah Tertinggal, Kesra dan Depsos	587.80	634.90	583.60	745.56	725.81	854.04	688.62	8.54
11	Departemen Kesehatan, BKKBN dan Badan POM	324.04	414.88	424.62	506.02	999.69	991.39	610.11	29.26
12	Lainnya	892.72	823.95	1,129.86	997.69	1,207.44	1,083.52	1,022.53	5.70
	JUMLAH	12,190.13	14,052.22	16,680.91	18,705.26	20,549.58	23,197.16	17,562.54	13.77

Sumber: Depkeu (2007)

Rata-rata nilai anggaran pembangunan pertanian selama periode tahun 2002-2007 adalah Rp 17,6 trilyun dengan rata-rata anggaran terbesar (Rp 6,8 trilyun) dikelola oleh Departemen Perhubungan, PU, Kimpraswil, dan ESDM. Selama periode tersebut rata-rata Departemen Pertanian mengelola jumlah anggaran terbesar kedua (Rp 4,96 trilyun). Sejalan tahun 2002 hingga 2006 nilai anggaran Departemen Pertanian selalu di bawah Departemen Perhubungan, PU, Kimpraswil, dan ESDM.

Secara relatif, rata-rata tertinggi pengelola anggaran pembangunan pertanian selama periode 2002-2007 adalah Departemen Perhubungan, PU, Kimpraswil, dan ESDM (38,9%) dan diikuti oleh Departemen Pertanian (27,1%). Depdagri, Depnakertrasn

dan BPPT beserta kelompoknya berturut-turut mengelola 7,3%, 4,4%, dan 3,2% (Tabel 2). Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih bahwa banyak departemen/imstansi di luar Departemen Pertanian (serta Dephut dan DKP) yang juga mengurus sektor pertanian.

Tabel 2. Persentase Nilai Anggaran Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berdasarkan Instansi, 2002 – 2007 (%)

No	Instansi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata	R (%/Thn)
1	Departemen Dalam Negeri	9.87	8.66	7.34	6.62	5.92	5.19	7.27	-12.05
2	Departemen Pertanian	21.47	23.48	22.25	26.85	30.61	37.89	27.09	12.51
3	BBPT, LIPI, Bakosurtanal, BATAN, Depdikbud, DEPAG	4.16	3.50	2.87	2.94	2.76	2.76	3.16	-7.49
4	Departemen Perindustrian dan Perdagangan	2.47	2.43	1.88	1.29	1.76	1.77	1.93	-3.80
5	Kementerian Koperasi dan UKM	1.80	1.60	1.48	1.25	1.38	1.06	1.43	-9.39
6	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.91	3.89	4.59	5.35	3.53	3.98	4.38	-1.48
7	KLH, Dephut dan DKP	2.15	2.02	1.82	1.53	1.52	1.56	1.77	-5.99
8	Departemen Perhubungan, PU, Kimpraswil dan ESDL	37.19	39.98	44.22	41.58	37.72	32.61	38.88	-2.14
9	BKPM, BSN, BPN	1.17	1.09	0.74	0.56	0.54	0.56	0.78	-12.86
10	Kementerian Daerah Tertinggal, Kesra dan Depsos	4.82	4.52	3.50	3.99	3.53	3.68	4.01	-4.42
11	Departemen Kesehatan, BKKBN dan Badan POM	2.66	2.95	2.55	2.71	4.86	4.27	3.33	14.25
12	Lainnya	7.32	5.86	6.77	5.33	5.88	4.67	5.97	-7.20
	JUMLAH	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Sumber: Depkeu (2007)

Pada tahun 2007 anggaran pembangunan pertanian terbesar dialokasikan untuk sarana, dan prasarana (infrastruktur) sebesar Rp 2,57 triliun (Tabel 3). Urutan kedua adalah untuk permodalan dan bantuan pemberdayaan (Rp 1,99 triliun). Berikutnya adalah penyuluhan (Rp 0,57 triliun), litbang (Rp 0,36 triliun), dan diklat (Rp 0,30 triliun). Alokasi kegiatan lainnya (diluar nomer 1 hingga 8) sebesar Rp 13,10 triliun.

Tabel 3. Nilai Anggaran Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berdasarkan Jenis/Kategori Layanan, 2002 – 2007 (Rp Milyar)

No	Kategori	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata2	R (%/Thn)
1	Penelitian dan Pengembangan	123.89	161.27	191.38	262.28	315.13	359.83	235.63	24.04
2	Pengendalian Hama dan Penyakit	6.08	9.96	12.14	16.38	19.75	22.06	14.39	30.58
3	Pelatihan dan Pengembangan SDM	100.83	129.37	143.16	190.54	253.57	301.52	186.50	24.81
4	Bimbingan, Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	315.67	364.47	557.60	530.20	549.60	572.76	481.71	14.28
5	Inspeksi, Standarisasi dan Pengawasan	13.33	13.45	17.98	20.76	23.21	26.60	19.22	15.29
6	Promosi dan Fasilitasi Pemasaran dan Perdagangan	111.44	138.09	175.40	194.90	197.26	203.32	170.07	13.27
7	Sarana, Prasarana dan Infrastruktur	1,306.06	1,439.00	1,542.05	1,918.45	2,351.50	2,568.86	1,854.32	14.71
8	Permodalan dan Bantuan Pemberdayaan	1,054.84	1,150.50	1,406.55	1,597.17	1,780.92	1,984.68	1,495.78	13.56
	Jumlah (1 s/d 8)	3,032.13	3,406.12	4,046.26	4,730.67	5,490.92	6,039.61	4,457.62	14.82
9	Lainnya	9,158.00	10,646.10	12,634.65	13,974.59	15,058.66	17,157.55	13,104.92	13.45
10	JUMLAH (1 s/d 9)	12,190.13	14,052.22	16,680.91	18,705.26	20,549.58	23,197.16	17,562.54	13.77

Sumber: Depkeu (2007)

Selama periode 2002-2007, rata-rata anggaran terbesar adalah untuk sarana dan prasarana (infrastruktur), yaitu 10,5 persen dan yang kedua adalah bantuan permodalan sebesar 8,5 persen (Tabel 4). Urutan berikutnya adalah penyuluhan (2,7%), litbang (1,6%), dan diklat (1,3%). Selama ini pembangunan infrastruktur pertanian selalu menempati urutan tertinggi dalam alokasi anggaran tetapi akhir-akhir ini infrastruktur pertanian tidak bisa beroperasi optimal. Hal ini merupakan indikasi anggaran yang dialokasikan mungkin tidak dikelola secara efisien. Pembiayaan pertanian menempati urutan nilai anggaran kedua tetapi dikelola oleh berbagai departemen/instansi yang di lapang bisa tumpang tindih sehingga tidak efektif hasilnya. Sedangkan alokasi anggaran litbang yang relatif kecil (kurang dari 2%) tampaknya akan sulit diharapkan untuk dihasilkannya penemuan-penemuan yang relatif unggul dan dinamis.

Tabel 4. Persentase Nilai Anggaran Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berdasarkan Jenis/Kategori Layanan, 2002 – 2007 (%)

No	Kategori	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata	Pertumbuhan (%/Thn)
1	Penelitian dan Pengembangan	1.02	1.15	1.15	1.40	1.53	1.55	1.30	9.13
2	Pengendalian Hama dan Penyakit	0.05	0.07	0.07	0.09	0.10	0.10	0.08	14.76
3	Pelatihan dan Pengembangan SDM	0.83	0.92	0.86	1.02	1.23	1.30	1.03	9.94
4	Bimbingan, Penyuluhan dan Penyebaran Informasi	2.59	2.59	3.34	2.83	2.67	2.47	2.75	0.10
5	Inspeksi, Standarisasi dan Pengawasan	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	1.28
6	Promosi dan Fasilitas Pemasaran dan Perdagangan	0.91	0.98	1.05	1.04	0.96	0.88	0.97	-0.59
7	Sarana, Prasarana dan Infrastruktur	10.71	10.24	9.24	10.26	11.44	11.07	10.50	1.03
8	Permodalan dan Bantuan Pemberdayaan	8.65	8.19	8.43	8.54	8.67	8.56	8.51	-0.18
	Jumlah (1 s/d 8)	24.87	24.24	24.26	25.29	26.72	26.04	25.24	0.98
9	Lainnya	75.13	75.76	75.74	74.71	73.28	73.96	74.76	-0.30
10	JUMLAH (1 s/d 9)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

Sumber: Depkeu (2007)

Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

KKP diselenggarakan dengan tujuan untuk peningkatan ketahanan pangan nasional dan sekaligus peningkatan pendapatan petani/peternak melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan suku bunga yang terjangkau. Sasaran KKP yaitu: (1) Petani dalam rangka intensifikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar serta pengembangan tebu; (2) Peternak, dalam rangka peternakan sapi perah, sapi potong, ayam ras dan itk; (3) Koperasi, dalam rangka pengadaan padi, jagung dan kedelai; (3) Nelayan, dalam rangka budidaya ikan dan penangkapan ikan

Pada saat ini peran pemerintah masih diperlukan dalam mendukung KKP, terutama dalam hal penyediaan subsidi suku bunga. Suku bunga yang dibayar petani adalah suku bunga komersial dikurangi subsidi yang dibayar oleh pemerintah. Merujuk pada surat Menteri Keuangan RI No. S-98/MK.05/2007 tanggal 8 Maret 2007 yang ditujukan kepada Direksi Bank Pelaksana KKP dan tembusannya kepada Menteri Pertanian, telah dilakukan penyesuaian tingkat bunga dan subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan, dengan rincian suku bunga KKP untuk tanaman pangan yang semula 9% turun menjadi 8% dan untuk KKP non pangan (KKP tebu, ternak, pengadaan pangan

dan perikanan) turun dari 12% menjadi 10% per tahun dengan rincian adalah sebagai berikut (Mat Syukur, 2007) seperti dicantumkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perubahan Tingkat Suku Bunga KKP, 2005-2007

No	Uraian	Mulai 1 Nov 2005 s/d 28 Feb 2007	Mulai 1 Maret 2007
1.	Tingkat Bunga kredit Bank	18%	16%
2.	Subsidi Bunga KKP		
	- KKP Int. Tanaman pangan	9%	8%
	- KKP tebu, ternak, ikan, pengadaan pangan	8%	6%
3.	Suku bunga yang dibayar petani, peternak dan koperasi		
	- KKP Int. Tanaman pangan	9%	8%
	- KKP tebu, ternak, ikan, pengadaan pangan	12%	10%

Bank pelaksana (*executing banks*) untuk KKP adalah Bank Umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Bank Umum terdiri dari 9 bank, yaitu BRI, BNI, Bank Mandiri, BUKOPIN, BCA, Bank Agro Niaga, BII, Bank Niaga, dan Bank Danamon. Sedangkan BPD meliputi 20 bank, yaitu BPD DKI, Jabar, Jateng, DI Yogyakarta, Jatim, Sumut, Riau, Sumbar, Sumsel, Lampung, Bali, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sulut, Maluku, dan Papua (Tabel 6).

Plafon KKP secara nasional dari tahun 2001-2006 selalu tetap setiap tahunnya, yaitu Rp 2.082.240 juta. Pada tahun 2001 Bank Umum memperoleh plafon Rp 1,847 trilyun sedangkan BPD mendapat plafon Rp 235,24 milyar. Sejak 2002 hingga 2006 Bank Umum dan BPD masing-masing menerima Rp 1,82 trilyun dan Rp 262,24 milyar per tahun.

Realisasi penyaluran kredit cenderung naik selama periode tersebut. Secara nasional selama periode 2001-2003 penyaluran meningkat dari 22,5 persen menjadi 79,1 persen. Mulai 2004 hingga 2006 penyaluran KKP secara nasional terus meningkat dari 117,0 persen menjadi 206,5 persen. Rata-rata penyaluran selama 6 tahun adalah 105,1 persen dari plafon yang disediakan.

Bank Umum rata-rata bisa menyalurkan KKP relatif lebih banyak dari BPD. Sejak tahun 2004 realisasi penyaluran KKP oleh Bank Umum sudah mencapai 122,8 persen dari plafon. Selama periode tersebut rata-rata Bank Umum mampu menyalurkan

kredit 110,2 persen. BPD baru bisa mencapai diatas plafon pada tahun 2005 atau setahun lebih lambat dari Bank Umum. Disamping itu rata-rata penyaluran KKP oleh selama periode tersebut hanya mencapai 68,7 persen atau jauh di bawah plafon yang disediakan. Di sini tampak bahwa kinerja Bank Umum lebih baik dibanding BPD. Kegigihan dalam penyaluran dan dukungan cabang yang tersebar di berbagai daerah membuat Bank Umum mampu menyalurkan KKP lebih banyak.

Tabel 6. Realisasi Penyaluran KKP Nasional, 2001-2006

Bank Pelaksana	Tahun	Plafon (Rp juta)	Realisasi (Rp juta)	% thd plafon
Bank Umum	2001	1.847.000	430.972	23,33
	2002	1.820.000	851.163	46,77
	2003	1.820.000	1.514.388	83,21
	2004	1.820.000	2.235.489	122,83
	2005	1.820.000	3.065.327	168,42
	2006	1.820.000	3.965.857	217,90
Sub total 2001-2006		10.947.000	12.063.196	110,20
Bank Pembangunan Daerah	2001	235.240	37.697	16,02
	2002	262.240	85.168	32,48
	2003	262.240	131.623	50,19
	2004	262.240	201.155	76,71
	2005	262.240	272.073	103,75
	2006	262.240	334.795	127,67
Sub total 2001-2006		1.546.440	1.062.511	68,71
TOTAL				
(Bank Umum +BPD)	2001	2.082.240	468.669	22,51
	2002	2.082.240	936.331	44,97
	2003	2.082.240	1.646.011	79,05
	2004	2.082.240	2.436.644	117,02
	2005	2.082.240	3.337.400	160,28
	2006	2.082.240	4.300.652	206,54
Total 2001-2006		12.493.440	13.125.707	105,06

Catatan: Posisi pada 31 Desember 2001-31 Desember 2006

Sumber: Deptan (2007)

Di Kabupaten Tulungagung, sejak periode Agustus 2006 hingga Januari 2007 BRI Cabang Tulungagung mampu menyalurkan seluruh nilai kredit sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan (Tabel 7). Plafon yang ditetapkan mulai dari Rp 9,1 milyar dan terus bertambah hingga Rp 9,9 milyar atau total kredit yang telah disalurkan sebanyak Rp 46,9 milyar selama 6 bulan. Jumlah kelompok yang menerima KKP selama periode tersebut adalah 355 kelompok.

Tabel 7. Perkembangan Kredit Ketahanan Pangan untuk Peternakan*
 Kanca BRI Tulungagung, Jawa Timur, Agustus 2006 - Januari 2007

Bulan	Jumlah Kelp/kop	Plafond	Realisasi	%
		(Rp)	Penyaluran (Rp)	Realisasi
Agust-06	70	9.072.046.225	9.072.046.225	100
Sep-06	68	9.043.488.225	9.043.488.225	100
Nop-06	70	9.315.098.225	9.315.098.225	100
Des-06	72	9.600.098.225	9.600.098.225	100
Jan-07	75	9.880.055.880	9.880.055.880	100
Total	355	46.910.786.780	46.910.786.780	100

Sumber: BRI Tulungagung, 2007

Catatan: *) Sapi Potong, Sapi Perah, Ayam Buras dan Itik

Persepsi Nasabah terhadap Persyaratan KKP di Provinsi Jawa Timur

Program KKP di Provinsi Jawa Timur diterima sebagian besar petani tebu, tanaman pangan dan peternak. Persepsi petani terhadap persyaratan KKP secara umum tidak mendapatkan kendala. Hanya dari segi waktu yang dibutuhkan dalam memproses KKP masih terlalu lama, sehingga sering lewat musim tanam. Bunga pinjaman yang ditetapkan oleh perbankan melalui KKP tidak terlalu tinggi dibandingkan bunga pinjaman komersial lainnya. Sementara sebagian besar petani menginginkan nilai nominal pinjaman ditambah sesuai dengan kebutuhan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ongkos tanam yang tinggi (Table 8).

Selain masalah di atas, petani juga sering dihadapkan pada persyaratan agunan yang menyulitkan. Namun untuk propinsi Jawa Timur sebagian besar responden menyatakan tidak mengalami kendala dalam penyediaan agunan karena biasanya agunan yang dibutuhkan pihak perbankan telah disiapkan oleh kelompok tani. Tetapi bagi kelompok lain seperti petani penggarap dan petani yang memiliki lahan garap yang sempit dan tidak mengikuti kelompok tani mengalami kesulitan dalam menyediakan agunan. Mereka tidak bisa memperoleh akses terhadap program KKP dan mencari alternatif dengan meminjam kepada lembaga keuangan non formal seperti tengkulak yang memberikan pinjaman dengan bunga relatif tinggi.

Tabel 8. Pelaksanaan KKP propinsi Jawa Timur, 2007

No	Uraian	Jawa Timur
1	Waktu yang dibutuhkan untuk memproses KKP	Proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana membutuhkan waktu yang lama
2	Jumlah pinjaman	Hendaknya pinjaman ditambah lagi jumlahnya
3	Bunga Pinjaman	Sudah sesuai, lebih kecil dari bunga pinjaman biasa
4	Lama waktu yang diperlukan dalam pemulangan kredit	Terlalu pendek, hendaknya diperpanjang lagi
5	Agunan	Tidak masalah
6	Biaya administrasi dan notaris	Tidak masalah
7	Pendapat Lainnya	Dana dari Bank harus menunggu pengembalian seluruh anggota, jadi pengambilan dana untuk pinjaman berikutnya jadi lambat

Sumber : Data primer

Bagi petani yang menjadi anggota kelompok tani pengajuan pinjaman harus berdasarkan kebutuhan kelompok. Kekurangan yang sering dialami oleh anggota kelompok tani adalah apabila ada sebagian anggota telah menyelesaikan pembayarannya, tetapi untuk pengajuan selanjutnya harus menunggu anggota kelompok lainnya yang belum lunas. Dengan demikian sangat tergantung pada kinerja dari manajemen kelompok tani tersebut.

Penyaluran KKP tidak dapat sepenuhnya di akses oleh petani di propinsi Jawa Timur. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan pengetahuan petani mengenai program KKP. Dsiamping itu, sulitnya prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak perbankan membuat hanya petani dan peternak yang memiliki skala usaha menengah keatas yang dapat mengakses skim KKP.

Persepsi Nasabah terhadap Persyaratan KKP di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Persyaratan KKP yang diterbitkan oleh perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara umum dapat dilaksanakan oleh petani. Walaupun demikian masih ada beberapa kendala yang dijumpai petani seperti harus adanya agunan yang disiapkan dalam pengajuan kredit. Hal ini sangat memberatkan petani karena tidak semua petani memiliki agunan terlebih bagi petani yang memiliki skala usaha kecil dan petani penggarap. Namun bagi petani yang ikut dalam kelompok tani agunan biasanya disiapkan oleh pengurus kelompok. Selain agunan, biaya notaris dan administrasi yang sebagai syarat kredit juga memberatkan petani karena biaya tersebut secara tidak langsung mengurangi jumlah pinjaman mereka (Tabel 9).

Tabel 9. Pelaksanaan KKP propinsi Nusa Tenggara Barat, 2007

No	Uraian	Nusa Tenggara Barat
1	Waktu yang dibutuhkan untuk memproses KKP	Proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana membutuhkan waktu yang lama
2	Jumlah pinjaman	Hendaknya pinjaman ditambah lagi jumlahnya
3	Bunga Pinjaman	Sudah sesuai, lebih kecil dari bunga pinjaman kemersial lainnya
4	Lama waktu yang diperlukan dalam pemulangan kredit	Sesuai
5	Agunan	Agunan surat tanah terlalu berat bagi petani penggarap, karena tidak mempunyai sertifikat
6	Biaya administrasi dan notaris	Biaya Notaris jangan terlalu tinggi dan hendaknya ditiadakan
7	Pendapat lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - Syarat yang mengharuskan ada NPWP sementara dalam pengisian NPWP terlalu sulit dan harus menyewa orang dan petani harus bayar pajak - Prosedur sulit dan mengeluarkan banyak biaya

Sumber : Data primer

Persyaratan lain yang sangat memberatkan petani untuk memperoleh KKP adalah harus adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kurangnya pengetahuan tentang perpajakan dan pengurusannya mengakibatkan petani harus mengeluarkan biaya untuk membuat NPWP serta menyewa orang untuk mengisinya. Persyaratan ini terlalu membebani dan menyulitkan petani. Akibatnya adalah berkurangnya jumlah pinjaman karena dipergunakan untuk biaya administrasi dan perpajakan. Padahal pinjaman yang diperoleh dari KKP ini bertujuan untuk menambah modal petani dalam pengembangan usahanya.

Mewngeni hal tersebut diatas ini pihak perbankan masih belum memihak pada petani. Seharusnya NPWP berlaku hanya pada debitur atau individu yang memiliki usaha besar dan memperoleh penghasilan tetap, sedangkan petani hanya sebagai pekerja musiman yang tidak mempunyai penghasilan tetap. Kebijakan ini hendaknya ditinjau kembali oleh pemerintah dan perbankan sehingga tidak menyulitkan petani.

Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP3)

SP3 adalah skim pembiayaan pertanian untuk mendorong pembiayaan/kredit pada usaha pertanian skala mikro dan kecil melalui bank pelaksana dengan cara penyediaan fasilitas jasa penjaminan dan resiko kredit. Tujuan SP3 adalah: (1) memberikan kepastian setiap usaha sektor pertanian mikro dan kecil untuk mendapatkan pelayanan kredit/pembiayaan; (2) mendorong penyaluran kredit/pembiayaan dari bank pelaksana

kepada sektor pertanian melalui mekanisme penjaminan dan bagi resiko; (3) meningkatkan portfolio kredit/pembiayaan dari perbankan ke sektor pertanian.

Sasaran kegiatan SP3 adalah: (1) terfasilitasinya petani/ kelompok tani/ gabungan kelompok tani kepada pelayanan pembiayaan/kredit dari bank pelaksana; (2) tersedianya kredit/pembiayaan bagi petani/kelompok tani/ gabungan kelompok tani tanaman pangan , hortikultura, peternakan dan perkebunan mulai dari hulu-budidaya-hilir; (3) terbangunnya sistem pembiayaan yang mudah diakses oleh petani/kelompok tani/ gabungan kelompok tani tanaman pangan , hortikultura, peternakan dan perkebunan.

Guna melihat keberhasilan daripada SP3, dalam Pedoman Umum SP3 (Departemen Pertanian, 2006) disebutkan beberapa indikator keberhasilan sebagai berikut: (1) terlayannya kebutuhan kredit/pembiayaan petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan dari hulu-budidaya-hilir; (2) meningkatkan jumlah petani yang dapat memanfaatkan pelayanan pembiayaan/kredit dalam meningkatkan kinerja usaha; (3) tersedianya data petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan yang memanfaatkan kredit/pembiayaan; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, mutu hasil dan nilai tambah hasil pertanian serta kesejahteraan petani dan peternak di wilayah kegiatan SP3.

Plafon pembiayaan/kredit SP3 dikelompokkan dalam dua skala yaitu skala usaha mikro dan skala usaha kecil. Plafon untuk usaha mikro adalah sebesar Rp 5 juta - Rp 50 juta. Sementara untuk petani skala usaha kecil yang berusaha secara kelompok/gabungan kelompok tani dikelompokkan menjadi dua skala yaitu plafon Rp 50 juta - Rp 250 juta; dan plafon Rp 250 juta - Rp 500 juta.

SP3 digulirkan sejak bulan Oktober 2006 dengan bantuan jaminan pemerintah 20 persen sebesar Rp 255 milyar. Dengan dana jaminan pemerintah tersebut, bank pelaksana diharapkan mampu menyalurkan total kredit SP3 dalam lima tahap sebesar Rp 1,275 triliun. Sada lima bank pelaksana yang ditunjuk untuk menyalurkan kredit SP3, yaitu Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank NTB, dan Bank Jatim. Penyerapan jaminan kredit SP3 dari pemerintah per 19 April 2007 baru sebesar Rp 113 miliar. Dari total Rp 113 miliar yang disalurkan sejak Oktober 2006 tersebut, sebanyak 55 persen diterima oleh kelompok usaha mikro. Sisanya diterima oleh kelompok usaha

kecil I dan II. Penerima kredit oleh kelompok usaha mikro didominasi petani dengan nilai di atas Rp 30 juta. Penyerapan kredit dengan nilai maksimal Rp 10 juta masih relatif kecil (Kompas, 2007).

Di NTB, realisasi SP3 pada akhir Mei 2007 didominasi oleh usaha mikro dengan plafon lebih dari Rp 5 juta – Rp 50 juta. Sedangkan penyerapan oleh Usaha Kecil I hanya dilakukan dua orang sebesar Rp 200 juta. Penyerapan oleh Usaha Kecil II tidak ada sama sekali (Tabel 10). Dari usaha mikro yang mampu menyerap kredit SP3, sebagian besar adalah pedagang (70 orang) dan industri (1 orang) dengan total nilai kredit Rp 2,965 milyar. Sedangkan penyerapan untuk pertanian (tanaman pangan) dan peternakan hanya sebesar Rp 0,441 milyar. Nilai kredit usaha mikro juga mendominasi penyerapan SP3 pada bulan Maret 2007 dibanding Usaha Kecil I dan Usaha Kecil II (Tabel lampiran 1). Hal ini merupakan indikasi bahwa sektor pertanian di bagian hulu relatif sedikit memanfaatkan kredit SP3 dibanding sektor pertanian di sektor hilir. Dengan demikian tujuan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian akan sulit tercapai melalui kredit SP3.

Tabel 10. Laporan Realisasi Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) di NTB, 29 Mei 2007

No.	Subsektor	Jumlah debitur	S/d bulan lalu	Bulan ini	Total
I. USAHA MIKRO					
<i>(plafon > 5 juta s/d 50 juta)</i>					
	Pertanian	4	116.000.000	-	116.000.000
	Peternakan	9	275.000.000	50.000.000	325.000.000
	Industri Pengolahan	1	-	50.000.000	50.000.000
	Perdagangan	70	1.245.000.000	1.670.000.000	2.915.000.000
II. USAHA KECIL I					
<i>(plafon > 50 juta s/d 250 juta)</i>					
	Pertanian	-	-	-	-
	Peternakan	-	-	-	-
	Industri Pengolahan	-	-	-	-
	Perdagangan	2	200.000.000	-	200.000.000
III. USAHA KECIL II					
<i>(plafon > 250 juta s/d 500 juta)</i>					
	Pertanian	-	-	-	-
	Peternakan	-	-	-	-
	Industri Pengolahan	-	-	-	-
	Perdagangan	-	-	-	-
	Jumlah	86	1.836.000.000	1.770.000.000	3.606.000.000

Sumber: Bank NTB (2007)

Persepsi Petani terhadap Persyaratan SP3 di Propinsi Jawa Timur

Sebagian besar penerima pelayanan SP-3 di Propinsi Jawa Timur adalah petani perorangan, peternak, pedagang saprodi, pedagang pengumpul dan pengusaha pengolah hasil pertanian Bank Penyalur pinjaman adalah Bank Jatim. Secara umum dalam pelayanan SP-3 ini petani tidak mengalami kesulitan yang berarti, karena syarat yang ditetapkan oleh pihak bank dapat dipenuhi. Hanya saja dalam proses kreditnya waktu yang dibutuhkan oleh pihak bank terlalu lama sehingga petani harus menunggu dan jumlah pinjaman yang diterima belum mencukupi untuk mengembangkan usaha pertanian.(Tabel 11).

Penerima SP-3 di Jawa Timur terbatas hanya pada petani perorangan yang pada umumnya memiliki skala usaha menengah dan luas. Petani yang memiliki skala usaha kecil tidak memenuhi syarat dalam penerimaan SP-3, kecuali masuk dalam kelompok tani. Untuk skala usaha mikro yang menerima SP-3 adalah usaha perdagangan besar seperti penjual saprodi dan usaha penggilingan padi. Dalam hal ini pihak bank tidak mau mengambil resiko kredit macet.

Tabel 11. Pelaksanaan SP-3 propinsi Jawa Timur, 2007

No	Uraian	Jawa Timur
1	Waktu yang dibutuhkan untuk memproses SP-3	Proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana membutuhkan waktu yang lama
2	Jumlah pinjaman	Hendaknya pinjaman ditambah lagi jumlahnya
3	Bunga Pinjaman	Sudah sesuai, lebih kecil dari bunga pinjaman biasa
4	Lama waktu yang diperlukan dalam pemulangan kredit	Terlalu pendek, hendaknya diperpanjang lagi
5	Agunan	Tidak masalah
6	Biaya administrasi dan notaris	Tidak masalah
7	Pendapat lainnya	Petani sebagai peminjam SP-3 hendaknya diikuti sertakan dalam asuransi jiwa

Sumber : Data primer

Persepsi Petani terhadap Persyaratan SP3 di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat penerima pelayanan kredit SP-3 adalah petani perorangan, pengusaha penggilingan padi, kelompok tani dan kelompok ternak. Bank pelaksana pinjaman adalah Bank Pembangunan Daerah (Bank NTB) . Sebagian besar petani menerima pinjaman dari nama kelompok. Dalam proses kredit syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak bank telah diurus oleh masing-masing ketua kelompok dan besaran jumlah pinjaman diatur oleh kelompok sesuai dengan luas usaha dan agunan yang telah diberikan oleh anggota.

Dalam proses pelaksanaan SP-3 petani menghadapi beberapa kendala. Misalnya, proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana membutuhkan waktu yang lama sehingga sering sekali melewati masa tanam. Petani juga harus menyediakan biaya untuk membuat agunan yang dibutuhkan oleh pihak bank dan harus memiliki Surat Perolehan Pemilikan Tanah (SPPT) serta membayar pajak. Disamping itu petani sebagai peminjam diwajibkan membayar biaya administrasi dan jasa notaris (Tabel 12). Pelaksanaan di lapang ini sangat berbeda dibandingkan dengan juklak yang sudah dikeluarkan oleh Sekretariat Jendral Departemen Pertanian, yaitu bahwa calon nasabah/peminjam skala usaha mikro dan usaha kecil pertanian pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan dari hulu, budidaya dan hilir yang tidak mempunyai agunan yang cukup.

Persyaratan agunan menjadi kendala bagi petani skala kecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak semua petani memiliki agunan yang memadai sehingga aksesibilitas terhadap sumber modal menjadi sangat terbatas. Padahal sesungguhnya pihak perbankan hanya sebagai tempat penyaluran kredit sedangkan penyedia modal kerja adalah pemerintah yang dianggarkan dari dana APBN.

Tabel 12. Pelaksanaan SP3 propinsi Nusa Tenggara Timur, 2007

No	Uraian	Nusa Tenggara Barat
1	Waktu yang dibutuhkan untuk memproses SP-3	Proses pengajuan pinjaman dan pencairan dana membutuhkan waktu yang lama
2	Jumlah pinjaman	Hendaknya pinjaman ditambah lagi jumlahnya
3	Bunga Pinjaman	Masih terlalu tinggi
4	Lama waktu yang diperlukan dalam pemulangan kredit	Tidak masalah
5	Agunan	Terlalu sulit, karena tidak semua petani memiliki agunan dan untuk memperoleh agunan petani harus mengeluarkan biaya lagi.
6	Biaya administrasi dan notaris	Jumlah pinjaman hendaknya tidak dipotong terlalu banyak untuk biaya administrasi
7	Pendapat lainnya	Dalam pengajuan pinjaman petani harus mempunyai SPPT, dan bayar pajak

Sumber : Data primer

Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3)

LM3 adalah lembaga yang tumbuh dan berkembang di masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan gerakan moral melalui kegiatan pendidikan keagamaan, sosial, pembekalan keterampilan masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. LM3 berbasis keagamaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia antara lain: pondok pesantren, seminari, paroki, pasraman, subak, dan lainnya.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat, Departemen Pertanian RI telah mengembangkan strategi pembangunan pertanian pada Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) berbasis keagamaan. Lembaga ini mempunyai potensi untuk dapat dikembangkan menjadi agen pembangunan agribisnis khususnya agroindustri di pedesaan, yang menyampaikan pesan pembangunan melalui kegiatan pendidikan moral dan sosial di dalam masyarakat (Departemen Pertanian, 2006).

Secara formal pembinaan terhadap LM3 berbasis keagamaan telah dilakukan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertanian dan Menteri Agama No. 346/1991 dan No. 94/1991. Selanjutnya sejak tahun 1996, pembinaan terhadap pengembangan agribisnis lebih terarah lagi, yaitu; dengan diterbitkannya Surat Menteri dalam Negeri No. 412.25/1141/PMD tanggal 21 Oktober 1996 dan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 555/Kpts/OT.210/6/97, serta Surat Sekretaris Jenderal, Departemen Pertanian No.RC.22G/720 IB VI/1998 tentang pengembangan agribisnis LM3.

Untuk pengembangan usaha pertanian, LM3 memiliki berbagai keunggulan antara lain: (i) Potensi sumberdaya manusia dengan pemimpin keagamaan yang kharismatik sebagai panutan masyarakat merupakan salah satu unsur strategis yang bisa menjadi unsur penggerak pembangunan pedesaan, (ii) Potensi sumberdaya alam dimana umumnya LM3 memiliki lahan pertanian, (iii) Potensi jaringan pemasaran karena adanya sistem hubungan kekerabatan antar LM3 dan antar masyarakat, (iv) Potensi teknologi sebagai sarana diseminasi dimana LM3 merupakan lembaga strategis untuk mengembangkan teknologi, (iv) Potensi kelembagaan dimana menyebarnya LM3 di pelosok daerah merupakan sumberdaya potensial dalam pengembangan ekonomi masyarakat.

Pembinaan pengembangan agribisnis melalui LM3 berdasarkan pada 4 (empat) prinsip yaitu : (1) Prinsip pengembangan unit bisnis di LM3 yang dilaksanakan oleh lembaga ekonomi seperti Koperasi, BMT (Balai Mandiri Terpadu) dan atau bentuk-bentuk lembaga lainnya; (2) Prinsip Kemandirian LM3, dimana Pemerintah hanya membantu pada tahap awal yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan dan atau magang, penyediaan agroinput dan bantuan modal serta pendamping teknis (pembina profesional), pada tahap selanjutnya LM3 harus mampu mandiri dan pemerintah hanya bertindak

sebagai fasilitator; (3) Prinsip Prisma, dimana pada prinsip ini LM3 yang berpotensi dalam pengembangan agribisnis diklasifikasikan: (a) LM3 Maju; (b) LM3 Berkembang; (c) LM3 Belum Berkembang; (4) Prinsip Selektif, dimana LM3 yang dipilih untuk dibina adalah LM3 yang berpotensi (memiliki potensi lahan dan potensi kemampuan) yang bersedia dibina dan bersedia membuka diri untuk mengembangkan agribisnis di LM3 dan bersedia menjadi penggerak masyarakat setempat (Departemen Pertanian, 2007).

Jumlah penerima LM3 yang tercatat pada tanggal 4 Agustus 2006 sebanyak 338 yang tersebar di berbagai provinsi (Tabel 13). Jumlah penerima LM3 terbanyak didominasi tiga provinsi di Jawa, yaitu Jawa Barat, yaitu 41 lembaga dan berikutnya adalah Jawa Timur (35 lembaga), serta Jawa Tengah (24 lembaga). Selanjutnya Bangka Belitung, Lampung, Bali, Jambi, dan Sumatera Barat masing-masing 13 lembaga. Jumlah penerima LM3 terendah yaitu di Riau (2 lembaga).

Tabel 13. Daftar LM3 Terpilih Per Provinsi, 4 Agustus 2006

No.	Provinsi	Jumlah Penerima	No.	Provinsi	Jumlah Penerima
1	Nangroe Aceh Darussalam	8	18	Kalimantan Tengah	7
2	Riau	10	19	Jawa Tengah	24
3	Kepulauan Riau	2	20	Maluku Utara	5
4	Sumatera Barat	13	21	Maluku	3
5	Jambi	13	22	Lampung	13
6	Sumatera Selatan	10	23	Jawa Barat	41
7	Sulawesi Selatan	18	24	Sumatera Utara	6
8	Sulawesi Tengah	5	25	Jawa Timur	35
9	Sulawesi Utara	5	26	Bengkulu	9
10	Gorontalo	3	27	DI Yogyakarta	5
11	Sulawesi Barat	3	28	Kalimantan Barat	6
12	Bali	13	29	Jakarta	2
13	Nusa Tenggara Barat	12	30	Bangka Belitung	13
14	Nusa Tenggara Timur	12	31	Banten	5
15	Sulawesi Tenggara	5	32	Papua	6
16	Kalimantan Selatan	9	33	Irian Jaya Barat	3
17	Kalimantan Timur	14			
				TOTAL	338

Sumber: Ditjen P2HP (2007)

Berdasarkan sumber dana APBN-P pada tanggal 2006 tercatat 92 lembaga yang menerima dana LM3 (Tabel 14). Jumlah lembaga penerima LM3 berkisar dari yang terendah, yaitu di Sumatera Barat, Riau, dan Maluku masing-masing 1 lembaga. sedangkan Jawa Timur seperti periode berikutnya tercatat memiliki lembaga penerima

LM3 sebanyak 35 unit dengan total bantuan sebesar Rp 3,14 milyar. Jumlah dana LM3 terendah Rp 90 juta per lembaga dan tertinggi Rp 194 juta per lembaga

Tabel 14. Daftar LM3 APBN-P Terpilih, 29 November 2006

No.	Provinsi	Jumlah LM3	Dana Bantuan (Rp juta)
1	Sumatera Barat	1	90,00
2	Sumatera Selatan	2	180,00
3	Riau	1	90,00
4	Bengkulu	2	180,00
5	Lampung	4	355,00
6	Jawa Barat	14	1.254,50
7	Banten	4	351,50
8	DI Yogyakarta	3	191,50
9	Jawa Tengah	19	1.704,00
10	Jawa Timur	35	3.141,25
11	Bali	2	177,40
12	Nusa Tenggara Barat	2	178,00
13	Sulawesi Tengah	2	194,00
14	Maluku	1	112,85
	TOTAL	92	8.087,15

Sumber: Ditjen P2HP (2007)

Total lembaga penerima dana LM3 pada tahun 2007 adalah 1.277 unit yang tersebar di seluruh provinsi (Tabel 15). Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menduduki urutan tertinggi dalam jumlah lembaga penerima LM3 masing-masing 178, 147 dan 120 unit. Provinsi Gorontalo hanya terdapat 5 unit lembaga penerima LM3, serta Provinsi Riau dan DKI Jakarta masing-masing hanya 4 unit.

Dana LM3 disalurkan Departemen Pertanian melalui Badan PSDMP, Ditjen P2HP, dan Ditjen Perkebunan. Terdapat lembaga-lembaga model penerima LM3 yang hanya menerima bantuan dana dari Badan PSDMP, tetapi juga terdapat lembaga-lembaga model yang menerima dana dari dua sumber sekaligus (Ditjen P2HP dan Badan PSDMP). Disamping itu juga terdapat lembaga-lembaga model LM3 yang menerima bantuan dana dari tiga sumber sekaligus (Ditjen P2HP, Badan PSDMP, dan Ditjen Perkebunan). Badan PSDMP yang terlibat dalam penyaluran dana LM3 tersebar di Jambi, Batang Kaluku, Noel Baki, Binuang, Batu, Kayu Ambon, Ketindan, dan Cinagara.

Tabel 15. Long List Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), 2007

No.	Provinsi	Jumlah LM3	No.	Provinsi	Jumlah LM3
1	Nangroe Aceh Darussalam	31	18	Kalimantan Barat	22
2	Sumatera Utara	46	19	Kalimantan Timur	13
3	Sumatera Barat	61	20	Kalimantan Tengah	29
4	Sumatera Selatan	89	21	Kalimantan Selatan	38
5	Riau	26	22	Nusa Tenggara Barat	41
6	Kepulauan Riau	4	23	Nusa Tenggara Timur	10
7	Bangka Belitung	12	24	Sulawesi Utara	8
8	Bengkulu	33	25	Sulawesi Tengah	26
9	Jambi	12	26	Sulawesi Tenggara	23
10	Lampung	48	27	Sulawesi Barat	10
11	Jakarta	4	28	Sulawesi Selatan	43
12	Jawa Barat	147	29	Gorontalo	5
13	Banten	73	30	Maluku	16
14	Jawa Tengah	120	31	Maluku Utara	11
15	Yogyakarta	18	32	Irian Jaya Barat	9
16	Jawa Timur	178	33	Papua	23
17	Bali	48		TOTAL	1.277

Sumber: Ditjen P2HP (2007)

Jumlah lembaga atau Pondok Pesantren (Ponpes) di Jawa Timur pada tahun 2006 yang menerima bantuan dana LM3 Reguler tersebar di 15 kabupaten/kota dengan total 20 Ponpes (Tabel Lampiran 2). Kabupaten-kabupaten dimana terdapat Ponpes penerima LM3 Reguler tersebut adalah Malang, Kota Batu, Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Jember, Probolinggo, Blitar, Bondowoso, Sidoarjo, Pasuruan, Lamongan, Pamekasan, Tuban, dan Jombang. Umumnya dana LM3 yang diterima digunakan untuk usaha peternakan (sapi perah, sapi potong, dan kambing). Berdasarkan evaluasi dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur diketahui bahwa hanya 3 Ponpes yang pelaksanaannya sesuai dengan proposal yang diajukan, yaitu di Kota Batu, Jember dan Lamongan. Selebihnya pelaksanaan LM3 tidak sesuai dengan proposal yang diajukan. Hal ini terkait dengan proses pengajuan proposal yang relatif tidak mengikuti prosedur standar.

Berdasarkan dana dari APBN-P terdapat 33 Ponpes yang tersebar di 20 kabupaten/kota di Jawa Timur 2006 (Tabel Lampiran 3). Tiap lembaga masing-masing menerima dana sebesar Rp 90 juta. Jenis usaha yang dilakukan Ponpes penerima LM3 adalah untuk usaha peternakan (sapi potong, sapi perah, dan kambing). Ponpes yang pro aktif bekerjasama dengan Dinas Pertanian/Peternakan kabupaten/kota mendapatkan pembinaan yang memadai dari dinas setempat. Walaupun demikian sebagian Dinas tidak mengetahui bahwa ada lembaga penerima LM3 di wilayahnya sehingga tidak dilakukan pembinaan.

Berdasarkan laporan dinas peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2006 terdapat 17 Ponpes penerima LM3 yang tersebar di 7 kabupaten kota, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu dan Bima (Tabel Lampiran 4). Jumlah dana yang diterima bervariasi dari yang terendah Rp 89 juta per Ponpes (Bima dan Sumbawa) sampai yang tertinggi sebesar Rp 1,17 milyar di Lombok Barat. Umumnya Ponpes penerima LM3 menggunakan dana untuk usaha peternakan, selebihnya ada yang digunakan untuk usahatani tanaman pangan dan perkebunan. Dari total dana LM3 yang diterima sebesar Rp 3,96 milyar, sebanyak Rp 3,22 milyar (sekitar 80%) digunakan untuk usaha peternakan. Dinas Pternakan kabupaten cukup pro aktif dalam menyalurkan dana LM3. Jika ada calon lembaga penerima yang proposalnya tidak layak maka dinas setempat akan mengusulkan supaya dibatalkan.

Persepsi Masyarakat terhadap Skim Pembiayaan LM3

Sebagai lembaga yang dekat dengan masyarakat, Pondok Pesantren (Ponpes) terlibat dalam kegiatan pendidikan dan sosial dengan kegiatan yang beragam. Kedekatan tersebut menyebabkan Ponpes tumbuh dan mengakar pada masyarakat. Selain bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, Ponpes juga dipandang sangat potensial bagi pengembangan ekonomi, khususnya di bidang usaha pertanian. Jenis usaha pertanian yang dilakukan setiap Ponpes beragam sesuai dengan sumberdaya lahan masing-masing.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang pembangunan pertanian, Departemen Pertanian telah mengembangkan strategi pembangunan pertanian pada Ponpes yang merupakan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), melalui bantuan sarana, pendampingan, dan pelatihan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini Ponpes penerima bantuan LM3 yang digunakan sebagai contoh diambil dari Ponpes yang berada di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tabel 1 menyajikan Ponpes yang digunakan sebagai contoh dalam penelitian ini.

Tabel 16. Nama dan Lokasi Ponpes Penerima LM3 Contoh pada Lokasi Penelitian di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, 2007

No.	Nama Ponpes	Desa	Kecamatan	Kabupaten	Provinsi
1.	Al Aqsa	Besole	Besuki	Tulungagung	Jawa Timur
2.	Al Falah	Karangsari	Rejotangan	Tulungagung	Jawa Timur
3.	Toriqot Agung	Kauman	Tulung Agung	Tulungagung	Jawa Timur
4.	Miftahul Ulum	Suruhan lor	Bandung	Tulungagung	Jawa Timur
5.	Gontor-3 Darul Ma'rifat	Sumber Cangkring	Gurah	Kediri	Jawa Timur
6.	Nurul Hakim	Kediri	Kediri	Lombok Barat	NTB
7.	Selaparang	Sedayu	Kediri	Lombok Barat	NTB
8.	Darus Shodiqien	Aik Darek	Batu Keliang	Lombok Tengah	NTB
9.	Qomarul Huda	Bagu	Pringgarata	Lombok Tengah	NTB
10.	Al Falah	Air Darek	Batu Kliang	Lombok Tengah	NTB

Sumber: data primer

Umumnya pengurus lembaga yang menerima bantuan dana LM3 merasa senang dengan program tersebut. Mereka berusaha sekuat tenaga agar bisa mengelola dana tersebut sebaik-baiknya dan diharapkan menguntungkan serta berkesinambungan. Walaupun demikian penerima dana ada yang sudah siap dan cukup berhasil dengan kegiatan sesuai proposal yang diajukan, tetapi sebagian belum benar-benar siap mengelola dana tersebut.

Perlu dicatat bahwa sulit untuk mengevaluasi keberhasilan LM3. Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam hal ini, yaitu: (i) sebagian besar lembaga penerima LM3 baru sekitar satu tahun atau kurang saat penelitian ini dilakukan sehingga belum cukup keberhasilan yang ditunjukkan oleh lembaga tersebut; (ii) untuk tanaman pangan yang sudah usai masa panennya hanya catatan usahatani yang bisa dievaluasi, tetapi kegiatan di lapang sudah tidak ada; dan (iii) lembaga penerima LM3, baik Ponpes, Seminari, Paroki, Pasraman dan lainnya adalah lembaga sosial yang umumnya bersifat nirlaba. Sebagian penerima dana LM3 tidak bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang dan hal ini juga sulit dihindari karena dalam Pedoman Umum LM3 tidak disebutkan cara status dana tersebut, yaitu sebagai hibah, dana bergulir, atau kredit.

Perlu kecermatan dalam menyalurkan dana bantuan yang ditujukan untuk usaha agribisnis lembaga penerima. Dalam hal ini kelayakan proposal dan proses pengajuan harus mengikuti prosedur standar. Jika proposal tidak layak maka harus ditolak, misalnya seperti yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Tengah. Disamping itu, dalam proposal juga harus disebutkan siapa yang secara resmi mewakili lembaga yang bersangkutan untuk menerima dana. Hal ini untuk menghindari perselisihan diantara para pengurus lembaga calon penerima dana LM3 seperti yang terjadi di Jawa Timur.

KESIMPULAN DAN SARAN

Anggaran pembangunan pertanian hanya sebagian kecil yang dikelola oleh Departemen Pertanian. Sebagian besar anggaran pembangunan pertanian dikelola oleh departemen/instansi lain. Anggaran untuk pembiayaan pertanian relatif kecil dan tersebar di berbagai instansi. Sedangkan infrastruktur pertanian mendapat porsi anggaran terbesar. Alokasi anggaran pembangunan pertanian sebaiknya dipusatkan atau dikoordinir oleh Departemen Pertanian. Jika modal petani dianggap penting, maka alokasi anggaran pembiayaan pertanian seharusnya ditingkatkan jumlahnya.

Program pembiayaan KKP sangat membantu petani pangan maupun peternak. Walaupun demikian jangka waktu pengajuan terlalu lama, jangka waktu pengembalian pengembalian dianggap terlalu pendek serta besarnya agunan, biaya notaris, serta NPWP masih merupakan hambatan bagi petani. Petani yang berkelompok dan ada penjaminnya, misalnya petani tebu, bisa memanfaatkan KKP secara optimal.

SP3 umumnya hanya diminati usaha skala mikro, relatif sedikit usaha kecil I dan II yang memanfaatkan kredit tersebut. Proses pengajuan dan pencairan kredit dianggap terlalu lama serta persyaratan agunan dinilai memberatkan petani kecil. Demikian pula jangka waktu pengembalian kredit dirasakan relatif pendek. Masyarakat pertanian di sektor hulu relatif sedikit yang memanfaatkan SP3 dibanding yang bergerak di sektor hilir.

Bantuan dana LM3 berpotensi menggerakkan perekonomian pedesaan. Penilaian proposal hendaknya dilakukan lebih cermat agar tidak terkesan sangat mudah diperoleh serta sangat mudah dipertanggungjawabkan. Pemberian sumber dana LM3 yang berasal dari dua atau tiga sumber untuk satu lembaga model perlu ditinjau kembali. Tidak semua

lembaga model bisa mengelola dana LM3 dengan baik. Dismaping itu juga menimbulkan rasa cemburu bagi lembaga lainnya yang tidak pernah menerima bantuan sejenis.

Strategi yang ditempuh pemerintah dalam kebijakan perkreditan untuk sektor pertanian dengan mengarahkan pada keterlibatan perbankan formal sebagai pelaksana merupakan langkah tepat. eksekuting. Namun, kebijakan pemerintah tersebut perlu diimbangi dengan upaya yang lebih sungguh-sungguh dalam membantu petani untuk meningkatkan skala usaha, kemampuan manajerial maupun aksesibilitas petani terhadap perbankan formal. Bantuan dan fasilitasi pemerintah dapat diwujudkan dalam bentuk: (i) sertifikasi lahan secara murah dan mudah untuk memenuhi agunan yang selama ini menjadi kendala untuk *bankable*; (ii) pembinaan kelembagaan petani yang lebih intensif terutama dalam aspek manajerial usaha; (iii) inovasi teknologi pertanian dari hulu sampai hilir untuk meningkatkan produksi dan produktivitas usahatani, (iv) pembangunan infrastruktur pertanian yang memadai; (v) penyediaan sarana produksi secara tepat waktu dengan biaya terjangkau; (vi) adanya pengawasan dan pendampingan misalnya dengan memfungsikan penyuluh dari departemen pertanian dalam penyaluran kredit sehingga tepat sasaran; (vi) jaminan pemasaran produk pertanian, (vii) pemerintah hendaknya mendirikan lembaga keuangan khusus seperti bank pertanian yang berfungsi untuk menangani seluruh program pembiayaan pemerintah sehingga penyalurannya dapat lebih terarah dan tepat sasaran, sehingga tidak ada petani yang memperoleh modal dari dua sumber program pembiayaan yang berbeda .

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Barat. 2006. Surat Keputusan Direksi PT. Bank NTB. Nomor SK/01/17/64/0026/2006 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) PT Bank NTB. Mataram
- Departemen Keuangan. 2007. Sebaran Nilai Anggaran Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Berdasarkan Instansi, 2002 – 2007 (Rp Milyar). Jakarta.
- Departemen Pertanian, 2006. Rancangan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Berwawasan Agribisnis tahun 2006. Bahan Rapat Dengar Pendapat Dengan Komisi IV DPR RI Tanggal 22 Maret 2006. Jakarta.

Departemen Pertanian. 2007. Pengembangan Agribisnis Melalui Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3). www.deptan.go.id

Dinas Peternakan Prop Jatim. 2006. Daftar Pondok Pesantren (PP) Penerima Program LM3 Reguler di Jawa Timur, 2006. Lampiran: 1 Surat Kepala Dinas Peternakan Prop Jatim. Nomor: 524/4929/117.04/2006. Tanggal: 8 Desember 2006. Perihal: Pelaksanaan Kegiatan LM3 Reguler di Jatim 2006. Surabaya.

Dinas Peternakan Prop Jatim. 2006. Daftar Pondok Pesantren Penerima Program Pemberdayaan LM3 Di Jatim dari Ditjen P2HP (APBN-P) Tahun 2006. Lampiran: 2 Surat Kepala Dinas Peternakan Prop Jatim. Nomor: 524/4929/117.04/2006. Tanggal: 8 Desember 2006. Perihal: Pelaksanaan Kegiatan LM3 APBN-P di Jatim 2006. Surabaya.

Ditjen P2HP. 2007. Daftar Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Terpilih. Lampiran Keputusan mentan No 468/Kpts/KU.210/8/2006. Agustus 2006. Jakarta.

Ditjen P2HP. 2007. Daftar Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) APBN-P Terpilih Tahun 2006. Lampiran keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen P2HP no 505/Kpts./KU.340/G/11/2006, Tanggal 29 November 2006. Jakarta.

Ditjen P2HP. 2007. Long List Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) Tahun 2007. Jakarta. Loose Leaf.

Kompas, 2007. Petani Kecil Terabaikan Target Bantuan Jaminan Kredit SP3 Belum Menyentuh Sasaran. 1 Mei 2007. www.kompas.co.id

Syukur, M. Sugiarto, Hendiarto dan Budi Wiryono. 2003. Analisis Rekayasa Kelembagaan Pembiayaan Usaha Pertanian. Puslitbang Sosek Pertanian, Badan Litbang Pertanian. Bogor

Tabel Lampiran 1. Realisasi Kredit SP-3 PT. Bank NTB, Posisi Bulan Maret 2007

No.	Kantor	Skala Kredit						Jumlah		Jumlah	
		Mikro		Kecil 1		Kecil 2					
		Nsb	Plafond	Nsb	Plafond	Nsb	Plafond	Nsb	Plafond	Nsb	Plafond
1.	Cabang Utama Pejanggik	4	165.000.000	2	160.000.000	-	-	6	325.000.000	6	325.000.000
2.	Cabang Mataram	31	1.187.500.000	6	590.000.000	1	400.000.000	38	2.177.500.000		
	- Capemb. Sweta	10	400.000.000	-	-	-	-	10	400.000.000		
	- Capemb. Narmada	22	785.000.000	-	-	-	-	22	785.000.000		
	- Capemb. Tanjung	29	923.000.000	6	700.000.000	-	-	35	1.623.000.000	105	4.985.500.000
3.	Cabang Praya	6	260.000.000	3	205.000.000	-	-	9	465.000.000	9	465.000.000
	- Capemb. Kopang	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.	Cabang Selong	5	165.000.000	1	125.000.000	-	-	6	290.000.000		
	- Capemb. Aikmel	2	90.000.000	-	-	-	-	2	90.000.000		
	- Capemb. Paokmotong	-	-	-	-	-	-	-	-	8	380.000.000
5.	Cabang Sumbawa	9	300.000.000	2	175.000.000	2	700.000.000	13	1.175.000.000	13	1.175.000.000
	- Capemb. Alas	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.	Cabang Dompu	77	2.057.500.000	17	1.925.000.000	-	-	94	3.982.500.000	115	4.934.600.000
	- Capemb. Manggalewa	19	402.100.000	1	200.000.000	1	350.000.000	21	952.100.000		
7.	Cabang Bima	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Capemb. Bolo	49	1.866.000.000	2	200.000.000	-	-	51	2.066.000.000		
	- Capemb. Sape	59	2.360.000.000	-	-	-	-	59	2.360.000.000		
	- Capemb. Tente	1	50.000.000	-	-	-	-	1	50.000.000	111	4.476.000.000
8.	Cabang Taliwang	-	-	5	765.000.000	-	-	5	765.000.000	5	765.000.000
	Total	323	11.011.100.000	45	5.045.000.000	4	1.450.000.000	372	17.506.100.000	367	17.506.100.000

Sumber: Bank NTB (2007)

Nsb : Nasabah

Tabel Lampiran 2 . Daftar Pondok Pesantren (PP) Penerima Program LM3 Reguler di Jawa Timur, 2006

No.	Kabupaten/Kota	No.	Nama PP	Jenis Usaha	Sumber Dana	Sesuai Usulan
1.	Kab Malang	1.	Ma'had Nurul Haromain Jl. Brigjen Abdul Manan Wijaya No. 141 RT 19 RW IX Desa Ngroto, Kec. Pujon	Sapi perah	BSDM	Tidak
		2.	PP As Sa'id (M Kholik) Kec. Kalipare	Sapi perah	P2HP	Tidak
2.	Kota Batu	3.	Yayasan Darush Sholihin Jl. Suropati No. 139	Sapi perah	BSDM	Ya
3.	Kab Tulungagung	4.	PP Al Falah RT 03 Rw 1 Desa Karang Sari, Kec. Rejotangan	Sapi perah	BSDM	Tidak
		5.	PP Al Aqso (Jiman Suhartana)	Sapi potong	P2HP	Tidak
4.	Kab. Kediri	6.	PP Gontor III Darul Marifat Desa Sumber Cangkring, Kec. Gurah	Sapi perah	BSDM	Tidak
		7.	PP Al-Hikmah Gendo (KH Abdul Manan) Dukuh Kweden, Ds. Karangrejo, Kec. Gampingrejo	Sapi	P2HP	Tidak
		8.	PP Modern Darul Marifat Gontor III (H. Ahmad Suharto, SAg) Desa Sumber Cangkring, Kec. Gurah	Pertanian & Peternakan Terpadu	P2HP	Tidak
5.	Kab. Trenggalek	9.	PP Al Manah desa Surondakan, Kec Trenggalek	Sapi perah	BSDM	Tidak
6.	Kab. Jember	10.	PP Nurul Qarmain (KH Yazid Karimulloh, Qh) Jl. Imam Sukarto 60 Baletbaru, Sukowono	Agribisnis Pakan Ternak	P2HP	Ya
7.	Kab. Probolinggo	11.	PP Zainul Hasan 2 (M. Yusuf Ubaidillah)	Sapi Perah	P2HP	Tidak
		12.	PP Badridduja (Ahmad Hilmy Imama) Jl. Sunan Kudus No. 02 Tromol Pos 08 Kec. Krasan	Alsintan dan Sapi Potong	P2HP	Tidak
8.	Kab. Blitar	13.	PP Al Aqso (Ust Nurcholish) Desa Jati Tengah, Kec. Selopuro	Sapi Perah	P2HP	Tidak
9.	Kab. Bondowoso	14.	PP Al Ishlah (KH Toha Yusuf Zakaria Lc) Jl. Raya Jember Km 7 Desa Dadapan, Kec. Grujugan	Penggemukan Sapi	P2HP	Tidak
10.	Kab. Sidoarjo	15.	PP Al Kahfi (Achmad Fathoni, Ssos) Desa Singogalih, Kec Tarik	Sapi Potong	P2HP	Tidak
11.	Kab. Pasuruan	16.	PP Ihyaa' Us Sunnah (H Abdurrahman Husin Assegaf) Jl. Wiroguno II No. 5 Desa Toyaning, Kec Rejoso	Sapi	P2HP	Tidak
12.	Kab. Lamongan	17.	PP Taswirul Afkar (Drs. Di'in Abd Salam) Desa Simbatan, Kec Sarirejo	Sapi Potong	P2HP	Ya

Tabel Lampiran 2. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	No.	Nama PP	Jenis Usaha	Sumber Dana	Sesuai Usulan
13.	Kab. Pamekasan	18.	PP Al Islami-As Salafy “Taman Sari” (KH Abdul Wasik) Jl. Ponpes Taman Sari Palengaan Desa Laok, Kec Palengaan Telp 0324-7707989, 7707011 HP 081332106013	Sapi	P2HP	Tidak
14.	Kab. Tuban	19.	PP Hidayatul Mubtadiin (Drs. Iman Zarkasy) Desa Sugih Waras, Kec. Jenu	Kambing	P2HP	Tidak
15.	Kab. Jombang	20.	PP Tarbiyatunnasyiin (KH MA Hafiz) Desa Pacul Gowang, Kec. Diwek	Sapi dan Kambing	P2HP	Tidak

Sumber: Dinas Peternakan Prop Jatim, 2006. Lampiran: 1 Surat Kepala Dinas Peternakan Prop Jatim. Nomor: 524/4929/117.04/2006. Tanggal: 8 Desember 2006. Perihal: Pelaksanaan Kegiatan LM3 Reguler di Jatim 2006.

Tabel Lampiran 3. Daftar Pondok Pesantren Penerima Program Pemberdayaan LM3 Di Jatim dari Ditjen P2HP (APBN-P) Tahun 2006

No.	Kabupaten/Kota	Nama Ponpes dan Alamat	Jenis Usaha	Jumlah Dana (Rp)
1.	Malang	PP An Nur Jl. Diponegoro IV/2-6 Kec. Bulu Lawang	Sapi Perah dan Potong	90.000.000
2.	Lumajang	Yayasan Kyai Syariffudin JIPPS Kyai Saifudin, Desa Wonorejo, Kec. Kedungjajang	Sapi dan Kambing	90.000.000
3.	Pacitan	PP Raya Pacitan 63581	Penggemukan	90.000.000
4.	Kota Kediri	PP HM Antara P.O. Box 140 Lirboyo, Mojoroto	Sapi Potong	90.000.000
.		PP Al Huda Jl. Masjid Al Huda Kel. Ngadirejo, Kec. Kota	Sapi	90.000.000
5.	Jombang	PP Kyai Mojo Jl. Wahab Hasbullah Jombang	Sapi	90.000.000
		PP Al-Hikmah Bahrul'Ulum Jl. K.H. M. Sultan Abd. hadi	Sapi dan Kambing	90.000.000
		PP Darul Hakam Jl. Irian Jaya No. 41 Desa Cukir	Sapi	90.000.000
		PP Darul'Ulum Rejoso, Peterongan	Sapi dan Kambing	90.000.000
		PP Fatihul'Ulum Jl. Jajarsari Kepuh Kembang, Peterongan	Sapi dan Kambing	90.000.000
6.	Ngawi	PP Al Hidayah Desa Sondriyan, Kendal	Sapi dan Kambing	90.000.000
		PP Nurul Asyhar Desa Teguhan, Kec Paron	Sapi	90.000.000
7.	Tuban	PP Wali Songo Goman Jl. Sunan Kalijogo, Gomang Lajulor, Singgahan	Sapi	90.000.000
8.	Pamekasan	PP Miftahul Ulum Kebon Baru, Kacok Palengaan	Sapi	90.000.000
9.	Pasuruan	PP Wisata AlAsy'ary Al Khoziny Desa Watuagung, Prigen	Sapi Perah	90.000.000
		PP Misthul Falah Selotambak, kraton	Sapi	90.000.000
		PP Ar Roudioh Dusun Tambakrejo, Paserepan	Sapi	90.000.000
10.	Tulungagung	PP Al Ghozali Dusun Bolu, Desa Punjul Karangrejo	Sapi Potong	90.000.000
		Yayasan Pesulukan Thoriqot Agung Jl. K.H. Wahid hasyim	Sapi Potong	90.000.000
11.	Bangkalan	PP Al Bakhriyah Desa Lomaer, Kec. Blega	Sapi	90.000.000
		PP Al Ibrahimy (Yapii) Jl. Raya No. 61 Konang	Sapi	90.000.000

Tabel Lampiran 3. Lanjutan

12.	Blitar	PP salfiyah Darur Roja Jl. KH Wahid Hasyim No. 1 Selokajang Srengat	Sapi dan Kambing	90.000.000
		PP Al Falah Desa Jeblok, Kec. Talun	Sapi dan Kambing	90.000.000
		PP Asrama Perguruan Islam Salafiyah (APIS), Dusun Sana, Desa Gondang, Gandusari	Sapi dan Kambing	90.000.000
13.	Lamongan	PP Al Hidayah Dusun Brumbun Lamongrejo, Kec. Ngimbang	Sapi	90.000.000
		Yayasan PP Sunan Drajat Jl. Raden Rajawali Banjaewati, Paciran	Sapi dan Kambing	90.000.000
14.	Sidoarjo	PP Putri Al Hikmatul Hidayah Desa Kedungcangkring, Jabon	Sapi	90.000.000
15.	Nganjuk	PP Subulul Huda Jl. Abdurrahman Saleh IV No. 56 Bogo	Sapi	90.000.000
16.	Madiun	PP Salfiyah Al Basyariyah Jl. Tirtorejo No. 54 Ds Kenongorejo, Kec. Pilangkenceng	Sapi	90.000.000
17.	Probolinggo	PP Al Bayinah Desa Tarokan, Kec Banyuanyar	Sapi dan Kambing	90.000.000
18.	Sumenep	PP Annuqayah Latee Desa Guluk- Guluk, Kec. Guluk-Guluk	Sapi	90.000.000
19.	Kota Mojokerto	PP Al Hasyimiyah Jl. Cakarayam No. 18 Kleurahan Mentikan, Kec. Prajurit Kulon	Sapi dan Kambing	90.000.000
20.	Jember	PP Darul Mukomah Jl. Sultan Agung No. 2-4 Desa Purwoasri, Kec. Gumuk Mas	Sapi dan Kambing	90.000.000

Sumber: Dinas Peternakan Prop Jatim, 2006. Lampiran: 2 Surat Kepala Dinas Peternakan Prop Jatim. Nomor: 524/4929/117.04/2006. Tanggal: 8 Desember 2006.
Perihal: Pelaksanaan Kegiatan LM3 APBN-P di Jatim 2006

Tabel Lampiran 4. Program LM3 Dinas Peternakan Provinsi NTB, 2006

No.	Kabupaten/Kota	Nama Lembaga	Alamat	Penandatangan SPK	Kegiatan Agribisnis	Anggaran
1.	Lombok Barat	1. Pondok Pesantren Selaparang	Jl. TGH. Abd. Hafiz, Desa Kediri Kec. Kediri, Kab. Lobar	Lalu Pattimura Farhan, S.Ag	Sapi potong & bibit 150 ekor	1.167.112.760
		2. Pondok Pesantren Nurul Haramain Putri NW Narmada	Jl. Hamzamwadi No. 5 Desa Lembuak, Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	Yusuf, S.Pd., M.Pd.	Ayam buras 4.000 ekor dan sarana produksi, modal kerja, dan hortikultura (Rp 12,6 juta)	180.100.000
		3. Yayasan PP Nurul Hakim	Jl. Taruna No. 5 Kediri Kab. Lombok Barat (83362) Tlp. (0370) 672063	TGH. Safwan Hakim	SDM & Kambing PE	200.000.000
		4. Pondok Pesantren Nurul Huda NW Gondang	Jl. Lingkar Madrasah No.1 Desa Gondang, Kec. Gangga Lombok Barat	M. Humaidy Hamid	Agribisnis padi hibrida	275.400.000
2.	Lombok Tengah	5. Pondok Pesantren Darus Shiddiqien NW.	Dusun Mertapaok, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang Kab. Lombok Tengah	TGH. Muh. Burhanuddin, S.Ag	Sapi potong 30 ekor Sarana produksi & modal kerja	162.600.000
		6. Pondok Pesantren Al-Falah Islamiyah	Pancardao Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah	Firman El Haris, S.Pt	Sapi bibit 20 ekor Sarana produksi & modal kerja	198.850.000
		7. Pondok Pesantren Komarul Huda	Jl. TGH. Badarudin Ds. Bagu, Kec. Pringgarata, Kab. Loteng	Drs. H. Azhari	SDM dan sapi potong	200.000.000

Tabel Lampiran 4. Lanjutan

No.	Kabupaten/Kota	Nama Lembaga	Alamat	Penandatngani SPK	Kegiatan Agribisnis	Anggaran
3.	Lombok Timur	8. PP Al-Kautsar Al Gontory	Aik Nymbuk Aikmel Utara Aikmel, Lombok Timur	Ust. Zainudin	Sapi bibit Sarana produksi & modal kerja	403.000.000
		9. Yayasan Pondok Pesantren Thohir Yasin	Jl. Palirata Desa Lendang Nangka, Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur	Ir. Syamsuri Hamzan	Sapi bibit 5 ekor Sarana produksi & modal kerja	263.850.000
		10. Pondok Pesantren Darussolihin	Desa Kalijaga, Kec. Aikmel Kab. Lombok Timur Telp. (0370) 672063	Drs. H. Mardin, AM	Agribisnis tanaman pangan dan perkebunan	281.600.000
4.	Sumbawa	11. PP Al Mutmainah	Desa Leseng Moyohulu Kab. Sumbawa 08123775807	H. Syamsuddin M., S.Pd	Agribisnis sapi dan tan. Pangan Sapi 20 ekor dan kandang	89.000.000
5.	Sumbawa Barat	12. Pondok Pesantren Al-Ihlas	Jl. Pondok Pesantren No.112 Ds. Menola, Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	KH. Zulkifli Muhadi, SH	Agribisnis hortikultura	200.000.000
6.	Dompu	13. Pondok Pesantren Salman	Jl. Karama Bura KM 01 Desa O'o, Kec. Dompu Kab. Dompu	Abdul Rajak, SH, S.Pdi	Pengadaan Alsin (RMU, traktor, tresher, corn sheler, sealer & bangunan RMU)	246.600.000
7.	Bima	14. PP Ikhlas Muhamadiyah	Tolobali RasanaE Barat Kab. Bima 0374 42728	Hj. Siti Hadijah, BSc	Sapi 19 ekor dan kandang Lokasi: Lido Kec.Belo Bima	89.000.000
Jumlah						3.957.112.760
Subsektor Peternakan						3.216.212.760

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTB (2007)